

## Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah: Studi Kasus Kota Tangerang Dan Kabupaten Pandeglang

Ahmad Sabaha<sup>1</sup>, Kalista Fauzia Hanum<sup>2</sup>, Anida Mumtaz<sup>3</sup>, Laila Amilia<sup>4</sup>, Gus Rajan<sup>5</sup>, M. Farid Fadhilah<sup>6</sup>, Adellia Putri<sup>7</sup>, Lilah Habibah<sup>8</sup>, Deris Desmawan<sup>9</sup>

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received:

Revised:

Accepted:

#### Keywords:

Ketimpangan Pembangunan

Ekonomi

Kota Tangerang

Kabupaten Pandeglang

### ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis ketimpangan pembangunan ekonomi antara Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan pendekatan kuantitatif deskriptif menggunakan data sekunder BPS (2020–2024). Hasil menunjukkan disparitas signifikan antara kedua wilayah, di mana Kota Tangerang memiliki PDRB per kapita (Rp96,89 juta) dan IPM (79,46) lebih tinggi dibanding Pandeglang (Rp11,29 juta; IPM 66,42). Indeks Williamson (0,791) mengonfirmasi ketimpangan struktural akibat perbedaan struktur ekonomi, kualitas SDM, dan akses infrastruktur. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan infrastruktur konektivitas, peningkatan alokasi anggaran untuk daerah tertinggal, dan pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal.

This study analyzes economic development disparities between Tangerang City and Pandeglang Regency in Banten Province using a descriptive quantitative approach based on secondary data from BPS (2020–2024). The results reveal a significant disparity between the two regions, with Tangerang City showing a higher GRDP per capita (Rp96.89 million) and Human Development Index (HDI) score (79.46) compared to Pandeglang (Rp11.29 million; HDI 66.42). The Williamson Index (0.791) confirms structural inequality caused by differences in economic structure, human resource quality, and infrastructure access. Policy recommendations include strengthening connectivity infrastructure, increasing budget allocation for underdeveloped areas, and promoting development strategies based on local potential.

*This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Ahmad Sabaha

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

JL. Raya Palka Km 3, Panancangan Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten. 42124

Email: [deridesmawan@untirta.ac.id](mailto:deridesmawan@untirta.ac.id)

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah proses penting dalam mewujudkan tujuan bernegara, yakni terciptanya masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera secara menyeluruh. Pembangunan tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti perubahan sosial, struktur masyarakat, dan institusi nasional. Menurut Todaro (1994:15), pembangunan harus mengarah pada efisiensi (efficiency), pemerataan (equity), serta keberlanjutan (sustainability), agar dapat menciptakan kemajuan yang menyeluruh.

Pembangunan ekonomi merujuk pada proses peningkatan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang, yang dibarengi dengan perbaikan sistem kelembagaan di dalam pemerintahan (Arsyad, 1999). Shanti dan Maruto (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, membandingkan tingkat kemajuan suatu daerah berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Keberhasilan pembangunan dapat dinilai melalui indikator-indikator yang mencerminkan dimensi-dimensi utama pembangunan. Dimensi tersebut meliputi aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia, hukum, politik, serta keadilan sosial secara umum. Pemerataan hasil pembangunan sangat penting untuk mencegah terjadinya ketimpangan pendapatan yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik sosial (Muttaqim, 2014).

Apabila pembangunan dilakukan secara parsial atau tidak menyeluruh, hal tersebut dapat memicu terjadinya ketimpangan. Perbedaan dalam hal sumber daya alam dan faktor produksi antarwilayah menjadi penyebab utama ketimpangan pendapatan. Wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya dan faktor produksi yang lebih lengkap akan memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar (Yeniwati, 2013).

Ketimpangan antarwilayah, atau regional disparity, timbul akibat tidak meratanya pembangunan ekonomi antarwilayah. Hal ini tampak jelas dari adanya perbedaan yang mencolok antara wilayah yang maju dengan wilayah yang tertinggal. Masalah ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan serius di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten.

Di Provinsi Banten, terdapat ketimpangan nyata antara Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. Ketidakseimbangan ini salah satunya disebabkan oleh struktur ekonomi yang berbeda. Kota Tangerang berkembang dengan sektor industri yang dinamis, sedangkan Kabupaten Pandeglang masih bergantung pada perekonomiannya pada sektor pertanian yang bersifat tradisional.

Ketimpangan antara Kota Tangerang yang berkembang pesat dan Kabupaten Pandeglang yang relatif tertinggal tercermin dalam perbedaan signifikan pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, serta akses terhadap pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik wilayah sangat memengaruhi tingkat pembangunan ekonomi di masing-masing daerah.

Letak geografis Kota Tangerang yang berdekatan dengan DKI Jakarta memberikan keuntungan dalam hal akses investasi dan pembangunan infrastruktur, yang tidak dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang. Kabupaten ini masih didominasi oleh sektor agraris dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif tinggi. Ketimpangan ini berdampak pada kesenjangan dalam kesempatan kerja, pendidikan, serta kualitas hidup masyarakat.

Ketimpangan pembangunan ini juga terlihat pada perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2022, Kota Tangerang mencatatkan PDRB sebesar Rp 182,21 triliun, sementara Kabupaten Pandeglang hanya mencapai Rp 32,03 triliun ([satudata.tangerangkota.go.id](http://satudata.tangerangkota.go.id)). Ketimpangan yang sangat mencolok ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan aktivitas ekonomi antarwilayah di Provinsi Banten.

Kondisi ketimpangan ini diperparah dengan tingginya nilai Indeks Williamson di Banten yang mencapai 0,791 pada tahun 2020, jauh di atas ambang batas ketimpangan sebesar 0,5 (BPS Provinsi Banten, 2020). Angka ini menjadikan Banten sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Timur. Fakta ini mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum berhasil menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.

Sjafrizal (2008) mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab utama ketimpangan pembangunan antarwilayah, di antaranya: perbedaan dalam kekayaan sumber daya alam, kondisi geografis, distribusi barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi, serta alokasi anggaran pembangunan yang tidak merata. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus disusun secara cermat untuk

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, pemerintah perlu menerapkan pendekatan spasial yang mengutamakan pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal tanpa mengesampingkan wilayah lain (Sutarno dan Kuncoro, 2004). Pendekatan ini penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang setara dalam mencapai kemajuan.

## KAJIAN TEORI

### Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup peningkatan pendapatan per kapita serta perbaikan dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Todaro & Smith, 2020). Proses ini tidak hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari perbaikan distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, pembangunan ekonomi harus mampu mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

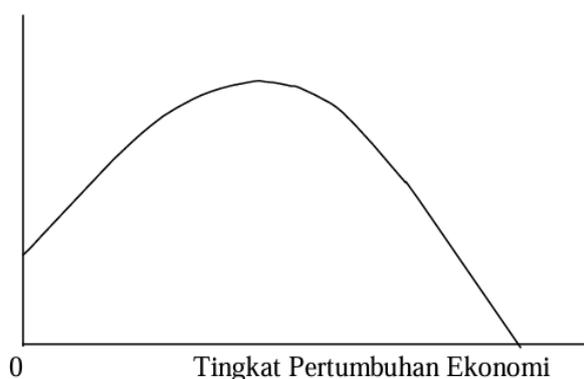
Menurut Boediono (1982), pembangunan ekonomi melibatkan perubahan struktural dalam

perekonomian yang ditandai oleh pergeseran sektor ekonomi dari agraris ke industri dan jasa. Hal ini berimplikasi pada peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan perbaikan standar hidup masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi sering kali dijadikan dasar dalam merancang kebijakan strategis, termasuk pengendalian inflasi, penyediaan layanan publik, serta penciptaan stabilitas politik dan sosial.

### Teori Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan merupakan kondisi dimana terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan, kesempatan, atau pembangunan antarindividu, kelompok, maupun wilayah. Salah satu teori ketimpangan yang sering digunakan untuk percobaan dalam ekonomi yaitu "Teori Kurva U Terbalik Kuznets".

Tingkat Ketimpangan



Gambar 1. Kurva U Terbalik Kuznets

Sumber: ResearchGate

Gambar 1, dapat kita lihat hubungan tingkat ketimpangan pendapatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hipotesis kurva U terbalik Kuznets yang dikemukakan oleh Simon Kuznets menyatakan bahwa di awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat, namun setelah mencapai suatu titik tertentu, ketimpangan tersebut akan menurun kembali. Peningkatan awal disebabkan oleh migrasi pekerja dari sektor pertanian ke industri yang menyebabkan terciptanya disparitas pendapatan. Hal ini terjadi ketika suatu negara beralih dari sektor agraris ke industri. Saat mencapai titik tertentu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat mengakibatkan penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dapat meningkatkan kesejahteraan secara umum.

### Indikator Ketimpangan: Gini Ratio

Gini Ratio merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Semakin mendekati angka 0, berarti pendapatan masyarakat di wilayah tersebut semakin merata; sebaliknya, semakin mendekati angka 1, menandakan ketimpangan yang semakin tinggi. Dalam konteks ini, Gini Ratio menjadi alat penting untuk menilai sejauh mana pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan data tahun 2023, Gini Ratio Kota Tangerang tercatat sebesar 0,343 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yang dikategorikan sebagai ketimpangan sedang. Sementara itu, Kabupaten Pandeglang memiliki Gini Ratio sebesar 0,243, yang termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Nilai ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Pandeglang cenderung lebih merata dibandingkan dengan Kota Tangerang. Namun, pemerataan tersebut belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi, karena bisa saja masyarakat Kabupaten Pandeglang berada pada tingkat ekonomi yang relatif rendah secara merata.

Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh terkait kondisi ekonomi dan pembangunan manusia di kedua wilayah, sejumlah indikator utama dapat dijadikan perbandingan. Kota Tangerang memiliki jumlah penduduk sekitar 2.132.000 jiwa, dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 206,60 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp 96,89 juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang pun cukup tinggi, yakni sebesar 79,46. Di sisi lain, Kabupaten Pandeglang memiliki populasi sekitar 1.305.000 jiwa, dengan PDRB total Rp 14,73 triliun dan PDRB per kapita Rp 11,29 juta. IPM di wilayah ini tercatat sebesar 66,42.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Kota Tangerang lebih unggul dalam hal capaian ekonomi dan pembangunan manusia. Hal ini tercermin dari tingginya PDRB per kapita dan IPM yang menunjukkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Akan tetapi, tingginya Gini Ratio di Kota Tangerang juga menandakan bahwa distribusi hasil pembangunan belum merata, dan masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, Kabupaten Pandeglang menampilkan kondisi yang berbeda. Meskipun Gini Ratio-nya lebih rendah yang menunjukkan pemerataan pendapatan yang lebih baik, indikator ekonomi lainnya seperti PDRB per kapita dan IPM masih berada pada level yang relatif rendah. Hal ini menandakan bahwa meskipun ketimpangan tidak terlalu mencolok, tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, analisis ini menggarisbawahi pentingnya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan hasil pembangunan menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan di kedua wilayah.

### **Ketimpangan Wilayah dan Faktor Penyebabnya**

Ketimpangan wilayah merupakan permasalahan struktural yang muncul akibat perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial antar daerah. Perbedaan struktur ekonomi, seperti dominasi sektor industri dan jasa di perkotaan dibandingkan dengan ketergantungan pada sektor pertanian di pedesaan, menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan antarwilayah (Kuncoro, 2012). Selain itu, distribusi infrastruktur, kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan yang tidak merata memperburuk ketimpangan pembangunan.

Faktor lain yang memengaruhi ketimpangan wilayah adalah perbedaan tingkat urbanisasi, kebijakan fiskal yang sentralistik, dan investasi yang terpusat di kota-kota besar. Ketimpangan dalam upah, kesempatan kerja, dan mobilitas sosial menyebabkan daerah tertinggal seperti Kabupaten Pandeglang tidak dapat mengejar ketertinggalan secara optimal dibandingkan dengan daerah yang lebih maju seperti Kota Tangerang.

### **Hubungan Indikator Pembangunan dengan Ketimpangan**

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara indikator pembangunan seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan ekonomi (Suryahadi et al., 2010). PDRB per kapita mencerminkan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu wilayah, sedangkan IPM mengukur kualitas hidup dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Ketimpangan cenderung meningkat jika pertumbuhan ekonomi tidak diiringi oleh pemerataan hasil pembangunan.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam bagaimana perbedaan indikator pembangunan antara Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan ekonomi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan inklusif di tingkat regional.

### **Pengembangan Hipotesis**

Perbedaan indikator pembangunan wilayah seperti PDRB per kapita, IPM, dan jumlah penduduk diduga berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah. Teori Kuznets menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, namun akan menurun setelah mencapai titik keseimbangan.

Dalam konteks ini, Kota Tangerang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan IPM yang tinggi, tetapi dengan Gini Ratio yang juga tinggi, menandakan ketimpangan yang cukup besar. Sebaliknya, Kabupaten Pandeglang memiliki Gini Ratio rendah, namun diiringi dengan rendahnya PDRB per kapita dan IPM.

Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>0</sub> (Hipotesis Nol):** Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara indikator pembangunan wilayah terhadap tingkat ketimpangan ekonomi di Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang.

**H<sub>1</sub> (Hipotesis Alternatif):** Terdapat perbedaan yang signifikan antara indikator pembangunan wilayah terhadap tingkat ketimpangan ekonomi di Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan dan membandingkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antara dua wilayah studi, yaitu Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. Jenis penelitian ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi secara sistematis berdasarkan data numerik.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena seluruh data yang digunakan bersifat angka dan dapat diukur secara statistik. Data yang dianalisis meliputi jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio, yang semuanya digunakan sebagai indikator dalam menilai ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah.

Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk menyusun hipotesis serta menganalisis perbandingan kondisi ekonomi kedua wilayah secara objektif, berdasarkan informasi numerik yang bersumber dari data sekunder, seperti publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen resmi dari pemerintah daerah terkait.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang, serta publikasi pemerintah daerah lainnya yang relevan. Data sekunder yang dikumpulkan mencakup indikator-indikator makroekonomi seperti jumlah penduduk, PDRB, PDRB per kapita, IPM, dan Gini Ratio, yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif kuantitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data secara sistematis dalam bentuk tabel, grafik, dan angka-angka statistik untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi kedua wilayah. Beberapa teknik statistik sederhana yang digunakan antara lain, Perbandingan antar indikator antar daerah, Tren pertumbuhan atau penurunan indikator dalam kurun waktu tertentu, Identifikasi gap ketimpangan berdasarkan perbedaan nilai indikator.

## HASIL PENELITIAN

Kota Tangerang merupakan kota penyangga terbesar ketiga di wilayah metropolitan Jabodetabek, setelah Kota Bekasi dan Kota Depok. Meskipun hanya berstatus sebagai kota penyangga, Kota Tangerang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Banten.

Julukan "Kota 1000 Industri" disematkan kepada Kota Tangerang karena banyaknya aktivitas industri dan manufaktur yang ada di wilayah ini. Reputasinya sebagai pusat industri menjadikan Kota Tangerang sebagai destinasi investasi yang menarik, didukung oleh kepercayaan investor terhadap potensi kota ini. Faktor utama yang mendorong kepercayaan tersebut antara lain adalah keberadaan berbagai proyek infrastruktur dan properti berskala besar sebagai respons terhadap peningkatan mobilitas masyarakat urban dan aktivitas bisnis dari Jakarta ke daerah penyangga.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, periode 2015–2019 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang sebagian besar disumbang oleh sektor transportasi dan

perdagangan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi kendaraan bermotor. Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang berlokasi di kota ini juga menjadi pusat kegiatan ekonomi di sektor jasa dan perdagangan.

Sumber daya alam juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kota ini. Tanah yang subur memungkinkan pertanian berkembang, terutama di wilayah Tigaraksa, di mana penduduk banyak membudidayakan padi, sayuran, dan buah-buahan. Hasil pertanian ini menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat dan dipasarkan ke berbagai daerah. Sungai Cisadane menyediakan pasokan air penting bagi pertanian dan kebutuhan rumah tangga, sementara keberadaan waduk menunjang sistem irigasi. Dengan pengelolaan yang tepat, sumber daya air ini mampu menunjang pembangunan ekonomi sekaligus menjaga ketahanan pangan.

Sementara itu, struktur ekonomi Kabupaten Pandeglang masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB daerah tersebut, mencerminkan dominasi ekonomi tradisional. Namun dalam satu dekade terakhir, perlahan terjadi pergeseran ke arah sektor sekunder dan tersier, seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa transportasi serta akomodasi. Perkembangan ini didorong oleh pembangunan infrastruktur serta hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

Kabupaten Pandeglang juga memiliki kekayaan sumber daya wilayah. Di Kecamatan Panimbang, KEK Tanjung Lesung difokuskan pada pengembangan pariwisata. Selain itu, garis pantai yang panjang mendukung aktivitas perikanan laut dan pertanian hortikultura. Di wilayah Kecamatan Sumur dan Cimanggu, terdapat Taman Nasional Ujung Kulon yang menjadi habitat Badak Jawa serta destinasi ekowisata karena kekayaan flora, fauna, dan ekosistem hutan hujan tropisnya. Kecamatan Menes, Saketi, dan Labuan dikenal sebagai pusat produksi padi dan hasil pertanian lainnya. Pelabuhan rakyat di Labuan juga menjadi titik penting dalam sektor perikanan di wilayah ini.

## Data Pembangunan PDRB dan IPM Wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang PDRB Kota Tangerang

Tabel 1. Laju Indeks Implisit PDRB Kota Tangerang Menurut Lapangan Usaha (%)

Klasifikasi Lapangan Usaha	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.59	2.36	9.34
Pertambangan dan Penggalian	2.10	4.03	6.59
Industri Pengolahan	-8.46	2.27	16.40
Pengadaan Listrik dan Gas	-0.06	1.58	2.33
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.68	5.87	3.45
Konstruksi	-0.57	2.19	7.08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6.25	0.75	9.60
Transportasi dan Pergudangan	-2.23	2.89	8.71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6.42	2.49	11.40
Informasi dan Komunikasi	-4.58	4.45	6.48
Jasa Keuangan dan Asuransi	-7.28	-1.17	14.93
Real Estat	3.48	1.47	2.70
Jasa Perusahaan	-4.25	0.73	2.69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.33	1.18	4.00
Jasa Pendidikan	-5.10	1.36	3.71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.12	1.83	2.92
Jasa Lainnya	-6.32	3.04	4.50
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>-10.1</b>	<b>1.04</b>	<b>14.62</b>

Sumber: BPS Kota Tangerang

Berdasarkan data di atas Kota Tangerang mengalami peningkatan PDRB dari tahun 2020-2022, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 8,96% lalu pada tahun berikutnya mengalami peningkatan sebesar 13,58% yang artinya tiap tahun mengalami peningkatan yang positif, salah satu sektor penyumbang PDRB terbesar di Kota Tangerang adalah Transportasi dan Pergudangan yang pada tahun 2022 Laju PDRB-nya mencapai 42,18%.

### IPM Kota Tangerang



Gambar 2. IPM kota Tangerang

Sumber: BPS Kota Tangerang

Angka IPM Kota Tangerang pada tahun 2024 mencapai 81,53 yang artinya tingkat pencapaian pembangunan manusianya mengalami peningkatan dibanding pencapaian pembangunan manusia tahun sebelumnya yaitu sebesar 80,98 dari kondisi pembangunan manusia yang ideal (IPM ideal= 100). Mengalami peningkatan sebesar 0,55% dari tahun 2023

### PDRB Kabupaten Pandeglang

Gambar 2. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pandeglang (Juta Rupiah)

Sektor PDRB	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.156.447,00	11.645.787,70	11.952.503,40
Pertambangan dan Penggalian	1.965.327,90	1.712.564,80	1.835.725,40
Industri Pengolahan	2.136.680,90	2.374.119,70	2.581.397,00
Pengadaan Listrik dan Gas	187.311,90	201.217,40	212.460,90
Pengadaan Air	15.229,70	15.528,80	16.480,00
Konstruksi	1.924.922,90	2.056.928,60	2.249.937,90
Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.706.314,90	4.013.909,60	4.229.963,70
Transportasi dan Pergudangan	2.165.344,30	2.470.367,60	2.649.143,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.659.672,50	1.847.683,40	2.047.605,30
Informasi dan Komunikasi	103.273,60	112.668,70	121.691,90
Jasa Keuangan	896.683,10	920.906,30	934.063,60

Sektor PDRB	2022	2023	2024
Real Estat	2.402.421,30	2.615.181,40	2.723.706,70
Jasa Perusahaan	69.734,00	77.247,10	81.585,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.911.104,90	1.985.255,60	2.199.394,70
Jasa Pendidikan	1.090.842,20	1.190.727,80	1.230.996,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	354.627,00	394.903,00	432.853,70
Jasa Lainnya	330.052,10	382.439,50	405.172,60
<b>PDRB Kabupaten Pandeglang</b>	<b>32.075.990,30</b>	<b>34.017.436,80</b>	<b>35.904.681,80</b>

Sumber: BPS Pandeglang

PDRB Kabupaten Pandeglang pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar, tumbuh dari sekitar 11,16 juta rupiah tumbuh menjadi 11,95 juta rupiah di tahun 2024. Sektor-sektor lain seperti pengadaan listrik dan gas, serta pengadaan air juga menunjukkan tren pertumbuhan, meskipun nilainya jauh lebih kecil dibandingkan sektor utama.

### IPM Kabupaten Pandeglang

Tabel 3. Nilai Komponen IPM Kabupaten Pandeglang

Komponen IPM	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (Tahun)	65,20	65,58	65,79
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,72	13,73	13,74
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,13	7,15	7,16
Pengeluaran (Ribu Rupiah)	8.827,00	9.151,00	9.574,00
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	65,84	66,42	66,69

Sumber :BPS Pandeglang

Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat dari 65,2 tahun 2022 ke 65,79 tahun 2024 kenaikan yang cukup konsisten menunjukkan perbaikan layanan kesehatan. Harapan Lama Sekolah (HLS) naik sedikit dari 13,72 menjadi 13,74. Kenaikan yang cukup stagnan menunjukkan bahwa harapan pendidikan baru belum mengalami lompatan signifikan, karena keterbatasan akses pendidikan dan untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari 7,13 menjadi 7,16 tahun menunjukkan masih banyak penduduk dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan dasar-menengah walaupun ada sedikit kenaikan. Secara keseluruhan, ketiga indikator menunjukkan tren positif namun dengan kecepatan pertumbuhan yang lambat.

### Kebijakan Pembangunan Daerah yang Relevan

Kebijakan pembangunan daerah di Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang menunjukkan perbedaan orientasi dan pendekatan, yang turut memengaruhi ketimpangan pembangunan antara keduanya. Kota Tangerang sebagai bagian dari wilayah megapolitan Jabodetabek cenderung lebih fokus pada pengembangan infrastruktur perkotaan, investasi industri dan jasa, serta digitalisasi layanan publik. Pemerintah Kota Tangerang juga secara aktif menarik investasi swasta dan melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi.

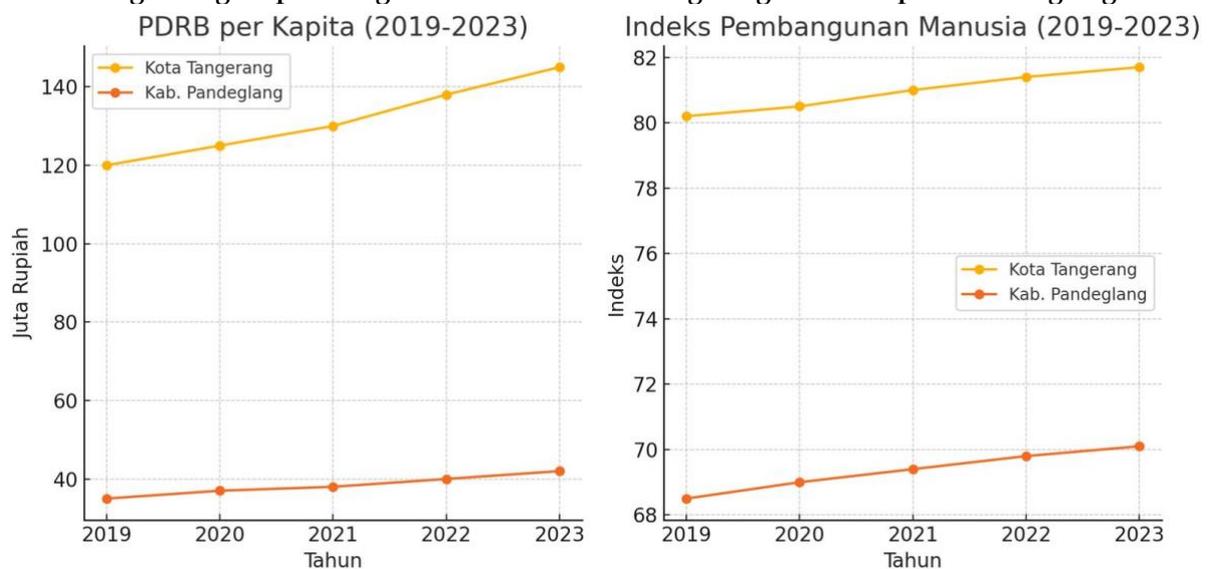
Sementara itu, Kabupaten Pandeglang yang merupakan wilayah agraris dan pariwisata, memiliki fokus kebijakan yang lebih bersifat sektoral seperti pengembangan pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis potensi lokal. Namun, keterbatasan anggaran daerah dan rendahnya konektivitas infrastruktur menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan. Upaya pemerataan

pembangunan melalui program dana desa dan pembangunan kawasan perdesaan juga dilakukan, namun dampaknya masih terbatas dalam mengejar ketertinggalan dibanding wilayah utara.

Kesenjangan ini harus di perhatikan dan di benahi secara berkelanjutan oleh pihak pemerintahan maupun pemerintahan daerah atau pemerintah provinsi Banten, agar mencapai hasil yang maksimal.

## ANALISIS

### Perbandingan tingkat pembangunan ekonomi Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang

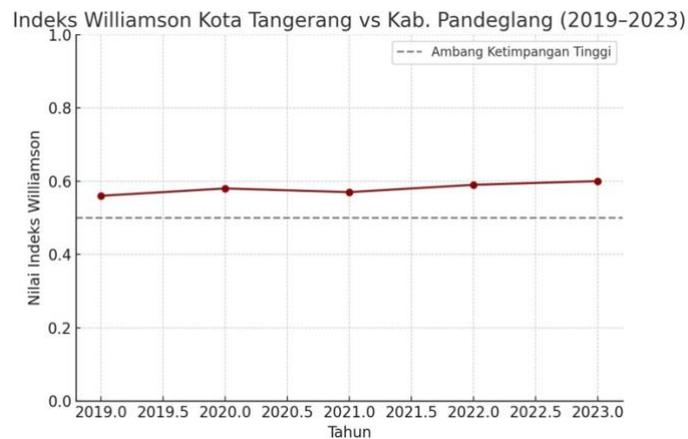


Berdasarkan analisis deskriptif terhadap data sekunder dari BPS selama lima tahun terakhir (2019–2023), terlihat perbedaan signifikan dalam indikator pembangunan antara Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. Kota Tangerang menunjukkan angka PDRB per kapita yang jauh lebih tinggi, didukung oleh sektor industri pengolahan dan jasa modern yang dominan. Sementara Kabupaten Pandeglang masih bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata dengan kontribusi ekonomi yang lebih rendah terhadap PDRB.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang konsisten berada di atas 80, yang menunjukkan pencapaian tinggi dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Sebaliknya, IPM Kabupaten Pandeglang masih berada di bawah angka 70, dengan tantangan utama pada akses pendidikan dan kesehatan berkualitas.

Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Banten masih belum merata, dengan dominasi pembangunan di kawasan utara (urban) dibanding kawasan selatan (rural).

### Perhitungan dan interpretasi Ketimpangan (Menggunakan indeks Williamson)



Berdasarkan analisis deskriptif terhadap data sekunder dari BPS selama lima tahun terakhir (2019–2023), terlihat perbedaan signifikan dalam indikator pembangunan antara Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. Kota Tangerang menunjukkan angka PDRB per kapita yang jauh lebih tinggi, didukung oleh sektor industri pengolahan dan jasa modern yang dominan. Sementara Kabupaten Pandeglang masih bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata dengan kontribusi ekonomi yang lebih rendah terhadap PDRB.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang konsisten berada di atas 80, yang menunjukkan pencapaian tinggi dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Sebaliknya, IPM Kabupaten Pandeglang masih berada di bawah angka 70, dengan tantangan utama pada akses pendidikan dan kesehatan berkualitas.

Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Banten masih belum merata, dengan dominasi pembangunan di kawasan utara (urban) dibanding kawasan selatan (rural).

### Faktor Penyebab Ketimpangan antara Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang

Ketimpangan antara Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang merupakan manifestasi nyata dari dinamika struktural dan geografis yang saling berkelindan dalam memengaruhi laju pembangunan wilayah. Ketidakseimbangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan angka-angka statistik, tetapi juga mencerminkan adanya kesenjangan mendasar dalam distribusi peluang, akses sumber daya, dan perhatian kebijakan pemerintah.

Salah satu faktor utama penyebab ketimpangan ini adalah konsentrasi kegiatan ekonomi yang berbeda secara signifikan. Kota Tangerang berkembang pesat sebagai pusat industri dan perdagangan modern, yang secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, dan meningkatkan produktivitas daerah. Sebaliknya, Kabupaten Pandeglang masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan. Kedua sektor ini umumnya memiliki nilai tambah yang rendah dan sangat tergantung pada kondisi alam, sehingga berkontribusi minim terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Syaifudin et al., 2024).

Letak geografis dan konektivitas infrastruktur juga menjadi elemen penting dalam memperbesar kesenjangan tersebut. Kota Tangerang yang berada di kawasan metropolitan Jabodetabek memiliki keuntungan geografis berupa kedekatan dengan DKI Jakarta serta dukungan infrastruktur transportasi yang lengkap, seperti jalan tol, kereta, dan bandara internasional. Fasilitas ini membuka akses yang luas terhadap pasar, investasi, dan mobilitas tenaga kerja. Sebaliknya, Kabupaten Pandeglang menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur dasar dan aksesibilitas, yang menyebabkan biaya logistik lebih tinggi dan koneksi ekonomi lebih terbatas (Noviar, 2021).

Selain itu, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga menjadi penentu utama ketimpangan wilayah. Kota Tangerang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang relatif tinggi, mencerminkan keberhasilan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja. Sementara itu, Kabupaten Pandeglang masih tertinggal dalam indikator-

indikator tersebut, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam pembangunan kapasitas manusia (Syaifudin et al., 2024).

Faktor fiskal juga memperkuat ketimpangan ini. Kota Tangerang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kapasitas fiskal yang jauh lebih besar dibanding Kabupaten Pandeglang. Keunggulan fiskal ini memungkinkan pemerintah daerah di Tangerang untuk membiayai proyek pembangunan strategis dan layanan publik yang lebih baik, sementara Pandeglang mengalami keterbatasan dalam membiayai kebutuhan dasar pembangunan (Dhyatmika & Atmanti, 2013).

Akhirnya, arah kebijakan pembangunan yang cenderung terfokus pada wilayah utara Provinsi Banten turut memperdalam ketimpangan antarwilayah. Kota-kota seperti Tangerang dan Cilegon mendapat prioritas dalam perencanaan dan eksekusi pembangunan daerah, sementara wilayah selatan seperti Pandeglang relatif terpinggirkan. Ketimpangan perhatian ini menjadikan wilayah selatan kurang tersentuh oleh proyek strategis nasional maupun investasi swasta (Noviar, 2021).

Dengan demikian, ketimpangan antara Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang merupakan akibat dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, geografis, sumber daya manusia, fiskal, dan kebijakan. Untuk mengurangi kesenjangan ini, diperlukan intervensi yang bersifat holistik dan berkelanjutan dengan menekankan pemerataan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan reformulasi kebijakan pembangunan yang lebih inklusif bagi seluruh wilayah Banten.

### **Dampak Ketimpangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Ketimpangan wilayah antara Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang bukan hanya terlihat dari angka-angka statistik, tetapi juga memberikan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. Salah satu dampak yang paling terasa adalah perbedaan pendapatan dan standar hidup. Kota Tangerang yang memiliki PDRB per kapita jauh lebih tinggi, menyebabkan masyarakatnya menikmati daya beli dan tingkat konsumsi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan warga di Pandeglang.

Selain itu, akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga sangat berbeda. Kota Tangerang memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan berkualitas, sementara masyarakat Pandeglang masih menghadapi berbagai kendala untuk mendapatkan layanan dasar tersebut. Kondisi ini memperlebar kesenjangan kualitas hidup antara kedua wilayah.

Ketimpangan ini juga mendorong terjadinya migrasi internal, di mana banyak penduduk dari daerah tertinggal seperti Pandeglang berpindah ke kota-kota maju seperti Tangerang. Perpindahan ini menambah tekanan di wilayah perkotaan, yang harus menampung arus penduduk yang terus meningkat, sementara daerah asal justru mengalami kekosongan penduduk dan berkurangnya sumber daya manusia.

Lebih jauh lagi, ketimpangan yang berlangsung terus-menerus berpotensi menimbulkan ketegangan sosial. Masyarakat di wilayah tertinggal bisa merasa tidak adil dan tersisih, yang dapat memicu kecemburuan dan konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi ketimpangan ini dengan kebijakan pembangunan yang merata dan inklusif, agar kesejahteraan dapat dinikmati secara adil di seluruh wilayah.

### **Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah**

Kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Banten masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam upaya menekan ketimpangan antarwilayah. Salah satu masalah utama adalah dominasi wilayah maju dalam alokasi program pembangunan. Pemerintah cenderung lebih memfokuskan proyek strategis di daerah-daerah yang sudah berkembang pesat seperti Kota Tangerang dan Kota Cilegon, sehingga ketimpangan dengan wilayah yang kurang berkembang seperti Pandeglang justru semakin melebar (Syaifudin et al., 2024).

Selain itu, kurangnya integrasi dalam perencanaan pembangunan antarwilayah menjadi hambatan besar. Pembangunan masih dilakukan secara sektoral dan terpisah-pisah, sehingga penggunaan sumber daya tidak efisien dan potensi sinergi antarwilayah tidak dapat dimaksimalkan. Akibatnya, dampak positif pembangunan tidak tersebar secara optimal melintasi batas administratif daerah (Dhyatmika & Atmanti, 2013).

Permasalahan lain terletak pada rendahnya efektivitas dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Walaupun dana ini tersedia, pemanfaatannya belum maksimal untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal. Hal ini diperparah oleh kapasitas kelembagaan daerah yang masih lemah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (Noviar, 2021).

Pendekatan pembangunan yang ada juga masih minim pemberdayaan lokal. Program cenderung bersifat top-down tanpa benar-benar melibatkan masyarakat dan mengakomodasi potensi serta kearifan lokal. Keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih terbatas, sehingga solusi yang dihasilkan kurang tepat sasaran (Syaifudin et al., 2024).

Terakhir, fokus pembangunan yang tidak seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan menjadi akar masalah lainnya. Strategi pembangunan lebih diarahkan untuk meningkatkan angka-angka ekonomi seperti PDRB, investasi, dan pertumbuhan industri tanpa memperhatikan apakah manfaat tersebut benar-benar dirasakan merata oleh seluruh masyarakat dan wilayah. Akibatnya, wilayah maju terus mengalami percepatan pertumbuhan, sementara wilayah tertinggal tetap stagnan dan sulit mengejar ketertinggalannya (Dhyatmika & Atmanti, 2013). Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dalam kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, terpadu, dan berorientasi pada pemerataan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Provinsi Banten.

### **Strategi dan Rekomendasi Pembangunan Wilayah yang Merata**

Strategi pembangunan yang efektif harus diawali dengan perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan ini penting karena membantu pemerintah memahami kondisi nyata dan kebutuhan spesifik masyarakat, sekaligus membangun rasa kepemilikan dan kepercayaan sehingga program yang dijalankan dapat berkelanjutan. Lebih dari itu, perencanaan partisipatif juga memperkuat prinsip demokrasi dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat secara inklusif dan transparan.

Selain itu, pembukaan isolasi wilayah menjadi prioritas melalui pembangunan infrastruktur yang mempercepat akses ke daerah-daerah terisolasi. Infrastruktur yang memadai akan membuka peluang baru untuk pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di perdesaan.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga harus ditingkatkan sebagai kunci keberhasilan pengembangan kawasan perdesaan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah berupaya meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat, meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih perlu diperbaiki. Peningkatan SDM akan mendukung kemitraan usaha, pemasaran, dan penguatan lembaga penyedia input produksi.

Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus penting melalui program kewirausahaan, pelatihan bisnis, serta skema penguatan komunitas. Hal ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mempromosikan produk unggulan dari daerah mereka.

Dalam hal pendanaan dan pengembangan usaha, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Kabupaten Pandeglang yang kaya sumber daya alam belum optimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena iklim investasi yang belum kondusif, sehingga perlu upaya untuk menarik minat investor sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.

Revitalisasi kelembagaan kawasan perdesaan juga sangat penting. Kelembagaan yang kuat akan memperbaiki tata kelola kawasan, mengurangi ego sektoral antar instansi, dan memastikan pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lokal serta menjaga kelestarian lingkungan.

Terakhir, pengembangan kawasan perdesaan harus mengoptimalkan potensi unggulan dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan harmonis secara sosial. Tidak hanya fokus pada agrobisnis, namun juga perlu pengembangan agroindustri untuk menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah kesiapan infrastruktur yang harus terus diperkuat agar pengembangan ini dapat berjalan optimal.

## **PENUTUP**

Penelitian ini mengkaji ketimpangan pembangunan ekonomi antara Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan struktur ekonomi, akses terhadap infrastruktur, dan kebijakan pembangunan telah menciptakan jurang ketimpangan yang cukup dalam antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Banten. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah yang tertinggal seperti Kabupaten Pandeglang.

Melalui analisis data PDRB, IPM, dan Indeks Williamson, terlihat bahwa pembangunan selama ini cenderung terpusat di kawasan yang memiliki potensi ekonomi tinggi, sementara daerah dengan karakter agraris dan keterbatasan infrastruktur belum mendapatkan porsi pembangunan yang setara. Oleh karena itu, arah pembangunan ke depan perlu menekankan pada strategi yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis potensi lokal, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan spasial dan memperkuat daya saing daerah secara merata.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat dalam menyusun dan mengimplementasikan program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan wilayah tertinggal.

## REFERENSI

- Alin, N. F., Heriberta, H., & Umiyati, E. (2019). Fakta empiris kurva U-terbalik Kuznets mengenai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 9–16. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6788>
- BPS-Statistics Indonesia. (n.d.). *PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha, 2010–2020*.
- BPS Kota Tangerang/BPS-Statistics of Tangerang Municipality. (2023). Kota Tangerang. *Id.Wikipedia.Org*, 9(1).
- Fatmala Putri, D., & Ratna Sari, W. (2023). Problematika Ketimpangan Ekonomi Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 163–172. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.330>
- Freeman. (2013). Laju Indeks Implisit PDRB Kota Tangerang Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2018 (persen). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9, pp. 1689–1699).
- Hakim, A. L. (2019). Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan: Studi di Kabupaten Pandeglang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 12–28. <https://doi.org/10.30656/sawala.v7i1.906>
- Nadya, A., & Syafril, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37–52. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5300>
- Nilai Komponen IPM Kabupaten Pandeglang, 2022-2024. (n.d.).
- Noviar. (2021). Inequality Analysis And Classification Of Economic Development Regencies/Cities In Banten Province 2016-2020. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(1), 24–33.
- Nurain, H., & Juliannisa, I. A. (2022). Analisis Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan pada Lima Provinsi Tertinggal di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 18(1), 53. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v18i1.1960>
- Puspitawati, L. T. (2013). Analisis Perbandingan Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSAPUR. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2), 1–16.
- Syaifudin, R., Mangara, T. H., Desmawan, D., & Julliansyah, M. R. (2024). *Karakteristik Ketimpangan Provinsi Banten : Pendekatan Struktur Ekonomi , Indeks Entropi Thiell , dan Multidimensional Scaling*. 5(3), 311–321. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i3.5902>
- Wahyu Dhyatmika, K., & Dwi Atmanti, H. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten

- Pasca Pemekaran. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(2), 1-8. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Wijaksono, M. (2009). Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan : *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(1), 4-12.
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169-176. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>
- Zahara, V. M., Adha, S., Adiwinata, D., & Nurhikmat, M. (2021). Aglomerasi Disparitas Pembangunan Wilayah Provinsi Banten. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(4), 228-236. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i4.263>
- Zasriati, M. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia Tahun 2010-2020. *Al-Dzahab*, 3(2), 119-131. <https://doi.org/10.32939/dhb.v3i2.1494>